

**PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
– PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM-PPK) DI
KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN (STUDI
SIMPAN PINJAM PADA KELOMPOK PEREMPUAN DESA MAKMUR)**

Oleh :

SURYADI HARYONO

ERMAN MUCHTAR

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km.12.5 Simpang Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax (0761)
63277

ABSTRACT

PNPM Mandiri is a community empowerment policies and programs established by Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 54 Year 2005 on Poverty Reduction Coordination Team, which is then passed through the Minister of Home Affairs No. 414.2/75/PMD 2007. PNPM-PPK program target is the poor who need financing productive activities especially savings and loan activities for women's groups. The main source of PNPM-PPK funds from the state budget, budgets, non-governmental, and partisipasi operating funds. BLM fund their own districts established by the government to consider the number and distribution of the population. PNPM-PPK in question here was implemented in Pangkalan Kerinci district since 2009. The result showed that the responses of informants 1) Implementation of the National Community Empowerment program PNPM-PPK in Pangkalan Kerinci District of savings and loans, especially for the women in the village of Prosperous obtain funding on the basis of the number of people more, female members of savings and loans are increasing every year 2) Lack of recognition is done facilitators and implemetor district or unit managers, and TPK to the community and also members of women's groups and community mnyebabkan many savings and loans groups of women do not know the unit PNPM-PPK program, 3) requirements that are not in accordance with the Operations manual PNPM-PPK in 2007 is considered very burdensome for members of the women's group is one of the conditions in the compulsory by TPK and UPK for group members who received PNPM-PPK funds were considered not worth the amount of the loan obtained. In addition to the members of the group who did not have not been able to obtain a loan guarantee fund PNPM-PPK.

Keywords: *Facilitator, Administrator and Implementor*

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta sebagai tindak lanjut dari program penanggulangan kemiskinan (PPK), maka pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan, dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis, dan kemandirian masyarakat terutama masyarakat miskin dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan lagi sebagai objek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan.

PNPM Mandiri merupakan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang kemudian diteruskan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/75/PMD Tahun 2007.

PNPM Mandiri yang semula bernama PNPM-PPK, pada tahun 2008 sekali lagi mengalami perubahan menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) berupaya untuk semakin mempertajam visi dan meningkatkan pencapaian misi dari PPK. Adapun misi dari PNPM-MP adalah kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian yaitu mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungan, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapi terutama masalah kemiskinan.

PNPM Mandiri merupakan program pengendalian kemiskinan yang pelaksanaannya dimulai dari tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, ataupun kecamatan, hingga ketingkat desa.

Adapun jumlah pinjaman yang dikucurkan untuk program PNPM-PPK di empat desa kecamatan Pangkalan Kerinci, disebabkan program PNPM-PPK tidak seluruh koperasi memperolehnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Oleh sebab itu kelompok yang memperoleh bantuan PNPM-PPK di Kecamatan Pangkalan Kerinci untuk tahun 2011.

Terdapat empat koperasi kelompok perempuan yang merupakan unit simpan pinjam, dimana kelompok perempuan merupakan koperasi unit simpan pinjam yang memiliki anggota seluruhnya kaum perempuan dimana kelompok perempuan tersebut menjalankan kegiatan simpan pinjam PNPM-PPK di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang memperoleh jumlah pinjaman terbesar, yakni Rp, 43.000.000, yaitu Desa Makmur, sedangkan Desa Kuala Terusan menjadi desa dengan pinjaman terkecil yakni Rp. 23.000.000.

Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktifitas pengelolaan dana simpan pinjam melalui pra survey di lapangan beberapa waktu lalu, penulis menemukan indikasi bahwa kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan di Kecamatan Pangkalan Kerinci khususnya di Desa Makmur yang memiliki Koperasi Simpan Pinjam bagi ibu-ibu yang terdiri dari 3 kelompok yang diberi nama Dasa Wisma satu, Dasa Wisma Dua dan Dasa Wisma Tiga, dalam pelaksanaannya tidak semua memenuhi buku Petunjuk Operasional Kegiatan (PTO).

Dana PNPM-PPK yang dikucurkan bertujuan membantu kaum ibu dalam meningkatkan pendapatan atau penghasilan keluarga dengan membantu permodalan usaha ibu-ibu yang memiliki usaha industry rumah tangga seperti membuat kerupuk, membuat kue-kue untuk dijual di pasar, berdagang kelontong, berdagang keliling ataupun berdagang dari pasar ke pasar yang dinilai memiliki kemampuan untuk membantu menambah penghasilan keluarga dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya.

Kelompok Dasa Wisma Desa Makmur telah dibentuk pada tahun 2008 dimana kelompok ini telah berdiri 5 tahun dengan dana yang digulirkan untuk membantu pemberdayaan unit simpan pinjam kelompok perempuan ini awalnya memperoleh bantuan Rp. 500.000,- pada tahun pertama. Hingga saat ini masing-masing kelompok semakin bertambah jumlahnya dan jumlah pinjaman dana PNPM-PPK yang dikucurkan bervariasi bagi masing-masing individu, dimana kebijakan yang ditentukan oleh pengurus PNPM-PPK bagi anggota yang masih baru hanya dapat pinjaman maksimal Rp. 500.000,- dan ini dapat ditingkatkan setiap dengan kelipatan yang sama.

Adapun kegiatan simpan pinjam pada kelompok Dasa wisma di Desa Makmur memiliki criteria bagi penerima dana PNPM-PPK yaitu :

1. Menjadi anggota dasa wisma dan memiliki Kartu Keluarga serta KTP
2. Telah memiliki usaha yang akan dibantu dan menanda tangani perjanjian untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan.
3. Mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh pengurus.

Dalam persyaratan yang ditetapkan oleh pengurus kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Makmur, dimana kegiatan tersebut terlihat ketika pinjaman akan diberikan kepada masyarakat, dimana masyarakat diwajibkan memenuhi persyaratan berupa penandatanganan surat pernyataan dengan dibubuhi materai yang isinya menerangkan bahwa masyarakat peminjam harus mengembalikan pinjaman mereka kepada tim pengelola kegiatan .bahkan ada persyaratan lain yang juga harus dipenuhi oleh masyarakat, seperti harus adanya jaminan pinjaman dari masyarakat berupa BPKP kendaraan bermotor dan sebagainya, yang jelas-jelas bertentangan dengan buku petunjuk operasional. Belum lagi mengingat tingkat suku bunga 20% per tahun dari proses pinjaman tersebut yang dirasakan berat oleh masyarakat.

Selain itu kelompok perempuan dan masyarakat mengenal program PNPM-PPK di Desa Makmur dan juga desa-desa lainnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci jarang sekali menerima penyuluhan mengenai program PNPM-PPK yang diberikan kepada masyarakat. Penyuluhan hanya diberikan sekali setahun apabila dilakukan pendataan dan akan menerima bantuan dana, oleh sebab itu bagi anggota kelompok yang baru banyak yang tidak atau kurang mengerti dan sebagian hanya mengikuti rekan-rekannya saja agar dapat memperoleh bantuan dana yang dapat dijadikan modal untuk berusaha.

Untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan mampu mengemban tercapainya tujuan bangsa, maka harus dilakukan suatu usaha yang disebut pengembangan sumber daya manusia (SDM). seperti yang dikemukakan oleh (Notoadmojo 1992 : 4) bahwa kualitas SDM dibagi 2 (dua) aspek aspek fisik (Kualitas Fisik) dan aspek non fisik. untuk meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan dengan melakukan program –program kesehatan dan gizi, sedangkan untuk meningkatkan kualitas non fisik atau disebut dengan kemampuan, maka pendidikan dan latihan adalah upaya yang paling diperlukan. upaya inilah yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Program PNPM-PPK yang merupakan suatu kebijakan publik maka dalam upaya pembahasannya mengacu pada teori analisis kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn dalam Riant Nugroho. Dalam teorinya Dunn mengatakan bahwa analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan meangomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Dalam analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim pemecahan masalah yaitu :

1. Devenisi: menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang masalah kebijakan.

2. Prediksi: menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternative kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu.
3. Preskripsi: menyediakan informasi tentang mengenai nilai konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang.
4. Deskripsi: menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif dalam kebijakan.
5. Evaluasi: kegunaan alternatif dalam memecahkan masalah. (Nugroho, 131:2008).

Adapun tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah local, serta penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi dan tujuan dana kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan yaitu mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha atau sosial dasar. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. (sumber: Buku Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan PNPM-PPK)

Konsep Operasional

Untuk memudahkan dan juga guna menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan penulisan ini, maka penulis memberikan beberapa konsep sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pekerjaan yang sudah direncanakan ataupun yang telah disusun guna mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini pelaksanaan adalah terhadap terlaksananya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Pangkalan Kerinci.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah program yang diresmikan oleh Presiden RI pada tahun 2007 yang bertujuan guna menanggulangi angka kemiskinan di Indonesia. Dalam penelitian ini Program PNPM yang diteliti adalah PNPM di Kecamatan Pangkalan Kerinci.
3. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah suatu program yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan dimana Program Pengembangan Kecamatan merupakan program yang disusun berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan guna membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup untuk lebih mandiri.
4. Simpan Pinjam adalah program yang dilaksanakan dan diberikan kepada masyarakat berupa program simpan pinjam dalam suatu organisasi perempuan di Kecamatan Pangkalan Kerinci.
5. Kecamatan Pangkalan Kerinci adalah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Pelalawan yang melaksanakan Program PNPM PPK.
6. Kelompok Perempuan Desa Makmur adalah nama kelompok perempuan yang dijadikan objek penelitian dimana kelompok perempuan dengan unit simpan pinjam dipilih karena dinilai mampu memberikan jawaban dan informasi khususnya dalam penggunaan dana PNPM-PPK setiap tahunnya dan dinilai berkembang setiap tahunnya.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Pangkalan Kerinci, dengan pertimbangan untuk mengetahui pelaksanaan program PNPM-PPK di Kecamatan Pangkalan Kerinci, yang merupakan studi Simpan Pinjam pada Kelompok Perempuan yang ada di salah satu desa yang ada di kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu Desa Makmur.

Penelitian dilakukan pada Unit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang terdiri dari tiga kelompok yaitu Dasa Wisma Satu, Dasa Wisma Dua dan Dasa Wisma Tiga Desa Makmur. Waktu penelitian dilakukan pada Bulan Mei s/d Juni 2013.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

- Camat Pangkalan Kerinci: 1 orang
- Penanggung Jawab Operasional Kegiatan : 1 orang
- Fasilitator PNPM-PPK di Kecamatan : 2 orang
- Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) : 1 orang
- Tim Pengelola Kegiatan (TPK) : 1 orang
- Anggota PNPM PPK Desa Makmur: 15 orang

Setelah seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, kemudian dipisahkan dan dipilah-pilah sesuai kelompoknya. Kemudian dilakukan tabulasi kepada data – data yang memiliki jenis dan karakteristik yang sama. Selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan kemudian dianalisa secara dekriptif.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program PNPM PPK di Kecamatan Pangkalan Kerinci

Pelaksanaan Program PNPM program PPK di Kabupaten Pelalawan mulai dilaksanakan pada tahun 2008 namun belum seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan saat itu dilaksanakan program PNPM, khususnya untuk Kecamatan Pangkalan Kerinci pelaksanaan program PNPM dilaksanakan pada tahun 2008 dimana pelaksanaan PNPM diawali pada 4 desa yang ada. Ditetapkannya penerimaan program PNPM di Kecamatan Pangkalan Kerinci awalnya atas dasar pertumbuhan penduduk yang pesat, sedangkan pertumbuhan penduduk tidak sejalan dengan pertumbuhan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2008 Kecamatan Pangkalan Kerinci masih melakukan pembenahan khususnya terhadap kelompok wanita yang saat itu merupakan kelompok yang baru berdiri dalam menggalakkan program industri rumah tangga seperti pembuatan makanan tradisional, pembuatan kerajinan rumah tangga, dan produksi kerajinan tangan guna meningkatkan pendapatan keluarga yang rata-rata pada tahun 2008 jumlah masyarakat kurang mampu di Kecamatan Pangkalan Kerinci mencapai 32% dari jumlah penduduk di 4 desa. (Desi, 2012).

Sesuai dengan Buku Petunjuk Operasional PNPM yang menjadi dasar PNPM Mandiri Pedesaan (2007 : 3) Lokasi sasaran program PNPM Mandiri Pedesaan adalah kecamatan-kecamatan yang tidak termasuk kategori kecamatan bermasalah dalam PPK dan kecamatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah dalam skema *cost sharing* dengan kelompok saran Rumah Tangga Miskin di pedesaan, kelembagaan masyarakat desa dan kelembagaan pemerintah lokal.

Besarnya dana PNPM pada tahun 2007 s.d 2009 mengalami perubahan pada tahun 2010 s.d 2012 sesuai dengan Surat Depdagri Tahun 2010 (Indra, 2012 : 88) seperti table berikut :

Dengan dialokasikan dana PNPM program PPK kepada Kecamatan Pangkalan Kerinci yang mana dana PNPM juga disalurkan ke 4 desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu Desa Makmur, Desa Kuala Terusan, Desa Rantau Baru dan Desa Mekar Jaya sangat membantu peningkatan perekonomian masyarakat di empat desa tersebut. Namun dalam penelitian ini Program PPK yang penulis kemukakan yaitu pelaksanaan program PNPM untuk Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa Makmur yang mana pada tahun 2011 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan pada Desa Makmur yang diberi nama kelompok simpan pinjam Dasa Wisma memperoleh kucuran dana PNPM sebesar Rp. 43.000.000,- Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Makmur dibagi menjadi tiga kelompok yaitu

Kelompok Simpan Pinjam Dasa Wisma Satu dengan jumlah anggota 20 orang, Dasa Wisma Dua jumlah anggota 25 orang dan Dasa Wisma Tiga yang jumlah anggotanya 20 orang.

Sebagai salah satu kecamatan yang menerima Alokasi Dana PNPM di Kabupaten Pelalawan, pertumbuhan tingkat penghasilan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci telah banyak mengalami peningkatan, dimana alokasi dana PNPM Program PPK yang diperuntukkan bagi kelompok perempuan dalam menjalankan simpan pinjam yang diperuntukkan oleh kelompok perempuan dalam menunjang dan membantu peningkatan perekonomian keluarga dapat dilaksanakan meskipun jumlah dana yang dikucurkan bagi kelompok perempuan khususnya di Desa Makmur tidak terlalu besar. Dimana tujuan penyaluran dana PNPM Program PPK di Kecamatan Pangkalan Kerinci khususnya bagi kelompok perempuan di Desa Makmur mengacu dari PTO Tahun 2007 yang menyatakan alokasi dana BLM-PNPM Perdesaan diperuntukkan bagi :

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
- b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal).
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya local (tidak termasuk penambahan modal)
- d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SP.P)

Selanjutnya dalam pelaksanaan penyaluran dana bagi setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/ satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan. Tiga usulan dimaksud adalah:

- a. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas/ ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan
- b. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM kecamatan. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok
- c. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan

Jika usulan non-SPP dari musyawarah khusus perempuan sama dengan usulan musyawarah desa campuran, maka kaum perempuan dapat mengajukan usulan pengganti, sehingga jumlah usulan kegiatan dari musyawarah desa perencanaan tetap tiga.

Selanjutnya dalam penelitian ini penulis mencoba mengupas permasalahan penyaluran dana PNPM bagi kelompok perempuan untuk kelompok simpan pinjam sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan menurut PTO Tahun 2007 tentang alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan salah satunya dapat disalurkan kepada kelompok simpan pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa dalam hal ini Desa Makmur khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM kecamatan. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok.

Penulis memilih Desa Makmur disebabkan Desa Makmur merupakan desa yang berpenduduk banyak dibandingkan desa-desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci, dan jumlah kelompok simpan pinjam bagi kelompok perempuan setiap tahunnya terus bertambah (pada table 1.5), selain itu jumlah

penyaluran Alokasi Dana PNPM yang disalurkan Kecamatan paling besar pada tahun 2011 di Desa Makmur sebesar Rp. 43.000.000,-

Berdasarkan penjelasan fasilitator kecamatan dapat dijelaskan bahwa kelompok simpan pinjam Dasa Wisma perempuan di Desa Makmur dinilai layak memperoleh dana PNPM PPK setelah melalui beberapa tahapan seperti hasil survey, jumlah anggota dan juga lamanya usaha tersebut berjalan selain pertambahan jumlah anggota setiap tahunnya meningkat.

Selain itu organisasi kerja yang dibangun melalui PPK, pada awalnya adalah lembaga-lembaga yang ada di desa khususnya Desa Makmur dan desa-desa lainnya yang berada di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang dibentuk untuk kebutuhan fungsional program. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, organisasi kerja tersebut diharapkan mampu mengelola secara mandiri atas hasil-hasil program yang salah satunya yaitu program Pengembangan Kecamatan melalui simpan pinjam kelompok perempuan, baik yang telah dikerjakan melalui PPK maupun yang akan dikerjakan melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk mencapai kemampuan ini perlu dilakukan kebijakan penataan kelembagaan. Kebijakan penataan menyesuaikan perkembangan yang terjadi di lapangan dan kebijakan serta peraturan perundangan yang ada.

Alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan, hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa dan kecamatan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengenalan desa diantaranya adalah:

1. Mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa, termasuk pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap sebelumnya
2. Kondisi kegiatan atau bangunan yang telah dibiayai melalui PNPM Mandiri Perdesaan tahap sebelumnya
3. Inventarisasi dokumen rencana pembangunan desa (tahunan atau jangka menengah)
4. Inventarisasi data kependudukan, program selain PNPM Mandiri Perdesaan yang akan masuk ke desa, dll

Dalam masa pengenalan kondisi desa sekaligus juga dilakukan sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan secara informal kepada masyarakat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di semua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada dasarnya sosialisasi dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan oleh pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan.

Pada pelaksanaan program PNPM Mandiri pedesaan di Kecamatan Pangkalan Kerinci terhadap masyarakat di desa-desa dinilai anggota masyarakat masih sangat kurang dilakukannya sosialisasi atau pengenalan PNPM itu sendiri. Masyarakat hanya mengetahui adanya program PNPM-PPK di Desa khususnya Desa Makmur dikarenakan informasi dari mulut ke mulut. Sedangkan pengenalan dilakukan setelah anggota simpan pinjam kelompok perempuan telah bergabung dan berjalan baru pihak kader pemberdayaan di masing-masing desa memberikan penjelasan dengan fasilitator.

Oleh sebab itu pengenalan akan dana PNPM yang disalurkan pemerintah di Kecamatan Pangkalan Kerinci hingga saat ini masih belum sepenuhnya memperkenalkan program PNPM kepada masyarakat. Oleh sebab itu masih ada nada-nada sumbang yang diperoleh dari anggota kelompok perempuan yang menerima dana PNPM yang menyatakan :

Bantuan dana PNPM yang disalurkan kepada kami awalnya kami hanya ikut terman saja. Tapi setelah kami tanyakan bagaimana dan siapa saja yang bias memperoleh dana PNPM ini, syaratnya apa saja kami bias menilai bahwa pihak kecamatan sendiri khususnya unit pengelola (UPK) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak mensosialisasikan atau memperkenalkan program ini kepada seluruh masyarakat.

Makanya tidak semua ibu-ibu atau perempuan yang ada di Desa Makmur mengetahui, mengenal dan mendapat bantuan dana PNPM, hal tersebut disebabkan mereka tidak masuk kedalam kelompok perempuan. Sedangkan perempuan yang tidak masuk kelompok Dasa Wisma simpan pinjam tidak dapat memperoleh dana PNPM, bagaimana mereka bias mengembangkan usahanya kalau tidak ada yang memperkenalkan dan mengajak kaum perempuan untuk bergabung dalam kelompok ini dan memperkenalkan dana PNPM ini kepada mereka. (Wawancara dengan : Ibu Jumiyem, ibu neni, ibu Ayu dan Ibu Rosna Sirait dari Dasa Wisma 2 Desa Makmur)

Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa baik Camat, Unit Pengelola Kegiatan dan Tim pengelola Kegiatan maupun fasilitator tidak dapat memperkenalkan dana PNPM kepada masyarakat, dimana sesuai dengan PTO tahun 2007 seharusnya program Alokasi dana PNPM dapat diperkenalkan kepada masyarakat yang memiliki masyarakat miskin guna membantuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem kelembagaan lokal dan pertemuan informal masyarakat seperti: pertemuan keagamaan; (pengajian, yasinan, persekutuan gereja, dll), pertemuan adat istiadat; (gotong royong, arisan, upacara adat dan lain-lain) merupakan alternatif untuk menyebarluaskan informasi PNPM Mandiri Perdesaan dan media penerapan prinsip transparansi. Media cetak, seperti koran dan tabloid, serta media elektronika, seperti radio dan TV, dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi PNPM Mandiri Perdesaan. Kenyataan yang terjadi dilapangan tidak terlaksana di Desa Makmur.

Selain itu pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*). Di samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek *good governance*, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan secara benar.

Hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa simpan pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Makmur disalurkan dengan persyaratan yang tidak seharusnya dan tidak sesuai dengan PTO tahun 2007 seperti yang dikemukakan oleh anggota Simpan Pinjam Dasa Wisma 1 yang menyampaikan :

Setiap anggota dasa wisma yang mendapatkan bantuan dana PNPM harus mengisi formulir keanggotaan, mengisi formulir pengajuan pinjaman, dengan melampirkan foto copy KTP, harus memiliki usaha dan juga harus menyerahkan jaminan minimal BPKB motor. Sedangkan dana awal yang dapat kami pinjam besarnya hanya Rp. 500.000,- per orang dengan bunga pinjaman 20% per bulan. Pinjaman dapat diangsur selama 6 bulan. Setelah lunas pinjaman dapat digulirkan kembali menjadi 1 juta. Tapi menurut kami jaminan itu sangat memberatkan, kalau tidak punya BPKB motor kita harus memberikan jaminan seperti surat tanah atau surat rumah, sedangkan pinjaman dana PNPM tidak sesuai besarnya dengan jaminan yang kita berikan. Tapi karena rata-rata kelompok dasa wisma membutuhkan bantuan dana tersebut maka kami terpaksa menyetujuinya. (Wawancara dengan : Ibu Siska, Rose, Nilawati, Rastina dari kelompok Dasa Wisma 1 dan 3 Desa Makmur).

Sedangkan usaha simpan pinjam kelompok perempuan tersebut merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat atau pengembalian macet maka desa atau kecamatan tidak akan mendapat dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun berikutnya. Oleh sebab itu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menyampaikan :

Persyaratan yang ditetapkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berupa persyaratan tambahan memang tidak tercantum dalam PTO atau buku Petunjuk Operasional PNPM-PPK tahun 2007 bahwa peserta yang mengikuti program PNPM-PPK ini benar tidak harus menyerahkan jaminan, tetapi hal tersebut harus kami lakukan untuk awalnya, karena apabila peserta macet lebih banyak lagi anggota yang tidak macet mendapat dampak negatifnya, jelas apabila pengelolaan dana PNPM tidak baik dan tidak dapat dikelola dengan baik atau macet maka untuk tahun berikutnya tidak mendapat dana PNPM lagi. Jadi itu memang merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh UPK. Namun apabila pembayaran sudah lunas jaminan saat itu juga dikembalikan oleh UPK. (*Wawancara dengan TPK Desa Makmur*)

Guna mendukung upaya pelestarian usaha simpan pinjam kelompok perempuan, sesuai dengan yang dijelaskan dalam buku Petunjuk Operasional PNPM tahun 2007 maka diperlukan beberapa komponen :

- a. Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial yang harus dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat, TPK, serta pelaku-pelaku lain PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan,
- b. Penyediaan sistem dan mekanisme monitoring, evaluasi, perencanaan, dan pengendalian secara partisipatif yang memungkinkan anggota masyarakat dapat mengetahui serta ikut mengontrol kegiatan yang direncanakan, sedang berjalan, maupun yang sudah selesai dilaksanakan,
- c. Penguatan lembaga-lembaga masyarakat di kecamatan dan desa, termasuk lembaga pengelola prasarana/sarana.

Selama tahap pelestarian peran kader desa dan teknik secara berkelanjutan sangat diharapkan, mengingat yang bersangkutan telah memperoleh alih pengetahuan dan ketrampilan dari para Fasilitator. Namun hal tersebut jelas belum sepenuhnya terlaksana karena penyaluran dana PNPM banyak yang tidak diketahui masyarakat khususnya di Desa Makmur. Selain itu kader pemberdayaan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini juga disampaikan oleh anggota kelompok perempuan yang tidak seluruhnya mengetahui dan mengenal kader di desa mereka.

Kendala dalam pelaksanaan PNPM-PPK Bidang Simpan Pinjam pada Kelompok Perempuan Desa Makmur

Kendala-kendala yang dihadapi baik Camat selaku penanggungjawab dan Pembina terhadap penyaluran dana PNPM dan jajarannya maupun melakukan monitoring kepada masyarakat dan memberdayakan dana yang disalurkan, dari pelaksana penyaluran dana PNPM-PPK :

- 1) Kurangnya pengenalan yang dilakukan oleh pelaksana baik oleh fasilitator, Pendamping Lokal, Tim Pengamat, dan juga Kepala Desa yang seluruhnya sama-sama memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan dan melakukan pengenalan mulai dari orientasi, survey, sosialisasi dan pengenalan program PNPM-PPK kepada masyarakat khususnya di Desa Makmur. Hal tersebut menyebabkan meskipun telah lebih 5 tahun program PNPM-PPK disalurkan masih banyak masyarakat khususnya bagi kelompok perempuan usaha simpan pinjam yang belum mengetahui, belum mendapatkan bantuan bahkan belum mengenal karena kurangnya pengenalan yang dilakukan pelaku di tingkat kecamatan.
- 2) Dengan diberlakukannya syarat dan ketentuan oleh pelaku ditingkat kecamatan dan desa dinilai memberatkan bagi masyarakat, dimana jaminan yang diminta UPK sebagai jaminan dirasa berat oleh masyarakat. Selain nilai jaminan jauh lebih besar dibandingkan nilai pinjaman yang diperoleh masyarakat. Selain itu tidak seluruhnya anggota kelompok perempuan yang ingin menggunakan dana PNPM memiliki jaminan sehingga mereka tidak dapat menggunakan dana PNPM bagi meningkatkan perekonomian keluarga.

- 3) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga masyarakat sulit untuk mengerti dan ketidak tahuan masyarakat akan program Alokasi Dana PNPM-PPK menyebabkan banyak masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan pinjaman Alokasi Dana PNPM-PPK meskipun sebagian masyarakat yang telah memiliki usaha dan bergabung dalam kelompok perempuan usaha simpan pinjam yang telah beberapa periode memperoleh pinjaman dana bergulir PNPM tersebut.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM-PPK di Kecamatan Pangkalan Kerinci khususnya bagi usaha simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Makmur memperoleh kucuran dana dari tahun 2008 dengan jumlah anggota kelompok perempuan saat itu masih sangat sedikit. Alokasi dana PNPM-PPK bagi kelompok perempuan di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci diberikan dengan jumlah dana terbesar untuk Desa Makmur atas dasar jumlah masyarakat yang lebih banyak, anggota perempuan usaha simpan pinjam yang setiap tahunnya meningkat dan hasil yang ditunjukkan oleh alokasi dana PNPM-PPK di Desa Makmur juga hasil usaha simpan pinjam kelompok perempuan mampu meningkatkan perekonomian keluarga oleh kaum perempuan yang memiliki usaha di Desa Makmur.
2. Kurangnya pengenalan yang dilakukan fasilitator kecamatan maupun unit pengelola, dan TPK kepada masyarakat dan juga anggota kelompok perempuan mnyebabkan masih banyak masyarakat dan kelompok perempuan unit simpan pinjam tidak mengenal program PNPM-PPK, bahkan bagi anggota perempuan yang sudah pernah memperoleh bantuan dana PNPM-PPK masih ada yang belum mengerti program PNPM yang diberikan, disebabkan kurangnya sosialisasi, pengenalan dan pendekatan yang dilakukan administrator dan implementor kepada masyarakat.
3. Persyaratan yang tidak sesuai dengan Buku Petunjuk Operasional PNPM-PPK tahun 2007 dinilai sangat memberatkan bagi anggota kelompok perempuan yang merupakan salah satu syarat yang diwajibkan oleh UPK dan TPK bagi anggota kelompok yang menerima dana PNPM-PPK yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah pinjaman yang diperoleh. Selain itu bagi anggota kelompok yang tidak memiliki jaminan belum dapat memperoleh pinjaman dana PNPM-PPK.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Usmara, 2002. *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. Asmara Books, Jakarta.
- Badudu, Zain, 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djanuari, Aries, 1998. *Manajemen Pelayanan Umum*, IIP Press, Jakarta.
- Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Gun Alex, 1984, *Manajemen*, Bumi Aksara. Jakarta
- Irfan, Muhamad, 1991. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan*. Rajawali Press, Jakarta.
- Islamy, M.Irfan 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Koryati, Nyimas Dwi dkk, 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, YPAI, Yogyakarta.
- Latif, Abdul, 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijakan Pada Pemerintah Daerah*. UII-Press, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005. *Kybernologi jilid 1 dan 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant, 2004. *Kebijakan Public (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant, 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant, 2008. *Public Policy*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif, 2004. *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Grasindo.
- Makmur, Syarif, 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektifitas Organisasi*. Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada

- Pramudji, Suparmi, 1983, *Ekologi Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta
- Rasyid, Ryas, 1997. *Fungsi-fungsi Pemerintahan*. Jakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri.
- Situmorang, Victor M, 1993. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta.
- Sudijono, Anas, 1996. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryadi, 1975. *Kepemimpinan Dan Pembangunan*, Alumni Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Mandar Maju.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Rafika Aditama

Dokumentasi :

- UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Buku Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan PNPM-PPK.